

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA
DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
PADA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

**OLEH :
MUHAMMAD IQBAL
NPM: 17.833.0336**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)29/6/22

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA
DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
PADA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

**OLEH :
MUHAMMAD IQBAL
NPM: 17.833.0336**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)29/6/22

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA
DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
PADA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas dan Bisnis
Universitas Medan Area



**OLEH :
MUHAMMAD IQBAL
NPM: 17.833.0336**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)29/6/22

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Nama : **MUHAMMAD IQBAL**

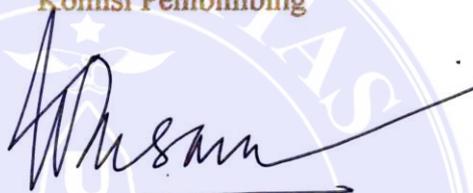
NPM : 17.833.0336

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing



(Warsani Purnama Sari, SE., Ak.,CA.,MM)

Pembimbing

Mengetahui :



(Ahmad Rofiqi, BE (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA)
Dekan



(Rana Fathinah Ananda, SE., M.Si)
Ka.Prodi Akuntansi

Tanggal/Bulan/Tahun Lulus : 28/Maret/2022

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiary dalam skripsi ini.

Medan, 28 Maret 2022
Yang Membuat Pernyataan,



MUHAMMAD IQBAL
NPM. 17.833.0336

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Iqbal
NPM : 17.833.0336
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 28 Maret 2022
Yang menyatakan,



MUHAMMAD IQBAL
NPM. 17.833.0336

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of implementing the village financial system and government internal control system on village fund management accountability in Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. This study uses quantitative research methods with an associative approach. The population in this study were all village government officials in Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. The sample that will be used in this study is all village government officials in Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency, consisting of 18 Village Heads, 18 Village Secretaries, and 18 Village Treasurers scattered in Percut Sei Tuan District. The data analysis technique in this study is a data quality test which includes validity test, reliability test then continued with classification assumption test which includes normality test, multicollinearity and heteroscedasticity then multiple linear regression analysis, hypothesis testing which includes T test, F test and R2 test. Based on the results of the t-test in the table above, it is known that the t-count value of the two independent variables, namely the implementation of the village financial system (X_1) with t-count is $2.349 < t$ table 1.675 and a significant value of $0.023 < 0.05$ and the Government's Internal Control System (X_2) with a t-count value of $3.742 > t$ -table 1.675 with a significant value of $0.000 < 0.05$, it can be concluded that the variables of the implementation of the village financial system and the variables of the government's internal control system have a positive and significant effect on the accountability of village fund management in Percut Sei Tuan District. Deli Serdang.

Keywords : *Village Financial System, Internal Control System, Village Fund Management Accountability*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang . Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparat Pemerintah Desa yang terdapat di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat pemerintahan desa yang terdapat di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang,yang terdiri dari Kepala Desa sejumlah 18,Sekertaris Desa sejumlah 18,dan Bendahara Desa sejumlah 18 yang tersebar di Kecamatan Percut Sei Tuan. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah Uji kualitas data yang meliputi uji validitas, uji Reliabilitas kemudian dilanjut dengan Uji Asumsi klasi yang meliputi Uji normalitas, multikolinearitas dan Heteroskedastisitas kemudian analisis regresi linear berganda, uji hipotesis yang meliputi uji T, uji F dan uji R^2 . Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas diketahui bahwa nilai t hitung dari kedua variabel bebas yaitu Penerapan sistem keuangan desa (X_1) dengan t hitung adalah sebesar $2,349 < t$ tabel $1,675$ dan nilai signifikan sebesar $0,023 < 0,05$ dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X_2) dengan nilai t hitung adalah sebesar $3,742 > t$ tabel $1,675$ dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan variabel penerapan sistem keuangan desa dan variabel sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Kata Kunci : Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

RIWAYAT HIDUP

Peneliti Dilahirkan Di Desa Percut Pada Tanggal 23 November 1994. peneliti Merupakan Anak Ke 3 dari 5 Bersaudara Dari Pasangan Bapak Fahrudin Dan Ibu Ermayani. Peneliti Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Di SD Negeri 51 Pada Tahun 2008, Pada Tahun Itu Juga Penelitian Melanjutkan Pendidikannya Di SMPN 33 Dan Tamat Pada Tahun 2011, Kemudian Melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di SMA Swasta Budi Agung Dan Tamat Pada Tahun 2014, Peneliti Melanjutkan Pendidikan Di Perguruan Tinggi Swasta, Tepatnya Di Universitas Medan Area (UMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Peneliti Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Satu (S1) Pada Tahun 2022.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat serta karunia yang telah diberikan - Nya kepada penulis sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”** yang disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata 1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

Selama dalam menyusun skripsi ini, Peneliti menyadari bahwa banyak rintangan dan tantangan yang di dapatkan dalam penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak baik dari pembimbing maupun masukan dari pihak lain sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-sebesaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area
3. Ibu Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area
4. Ibu Warsani Purnama Sari, SE., Ak.,CA.,MM Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing, memberikan kepercayaan, dorongan, saran, nasehat dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Sari Bulan Tambunan, SE, MMA selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta memberi saran, bimbingan, nasehat, pengarahan dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Desy Astrid Anindya, SE., M.Ak selaku Dosen Sekretaris yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua Orang tua saya, Ayahanda Fahrudin, Ibunda Ermayani dan terimakasih karena kalian telah senantiasa memberikan dukungan,

perhatian, semangat, motivasi, inspirasi dan doa yang tak ternilai harganya. Tiada kata yang pantas dan tiada nilai yang layak untuk mengungkapkan dan menggambarkan betapa besarnya peran mereka dalam kehidupan peneliti.

8. Kepada teman seperjuangan yang juga sama-sama membantu untuk penyelesaian skripsi masing-masing.
9. Seluruh pihak – pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

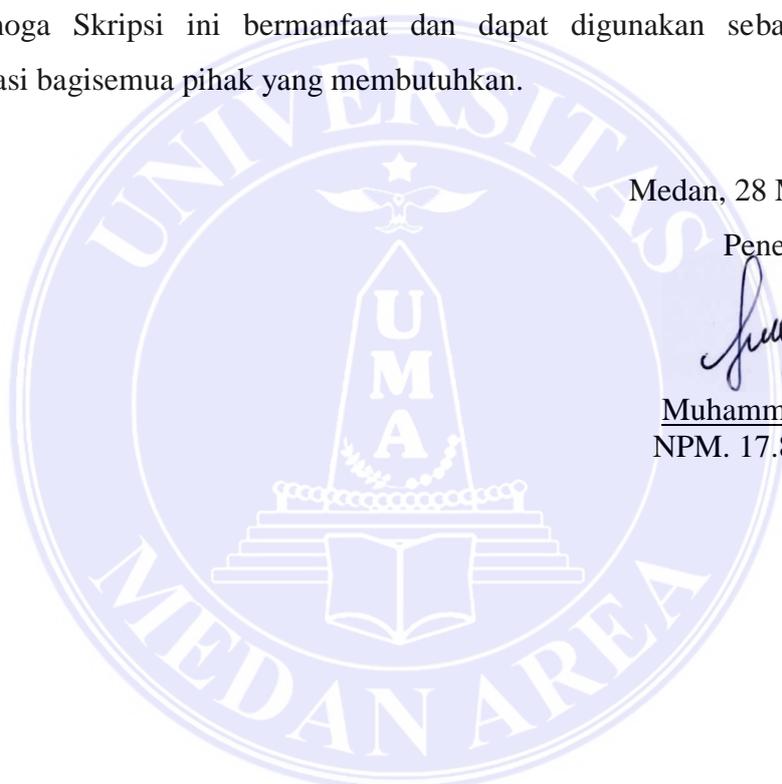
Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai taplbahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Medan, 28 Maret 2022

Peneliti,



Muhammad Iqbal
NPM. 17.833.0336



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II : LANDASAN TEORI	
2.1. Penerapan Sistem Keuangan Desa	7
2.1.1. Pengertian penerapan sistem keuangan desa	7
2.1.2. Tujuan penerapan sistem keuangan desa	8
2.1.3. Indikator penerapan sistem keuangan desa	10
2.2. Sistem pengendalian Internal pemerintah	10
2.2.1. Pengertian sistem pengendalian internal pemerintah	10
2.2.2. Tujuan Sistem pengendalian internal pemerintah	13
2.2.3. Indikator sistem pengendalian internal pemerintah	14
2.3. Akuntabilitas pengelolaan dana desa	14
2.3.1. Pengertian akuntabilitas pengelolaan dana desa	14
2.3.2. Tujuan Akuntabilitas pengelolaan dana desa	16
2.3.3. Indikator Akuntabilitas pengelolahan dana desa	17
2.4. Pengaruh penerapan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	17
2.5. Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	18
2.6. Penelitian terdahulu	19
2.7. Kerangka konsep penelitian	20
2.8. Hipotesis	21
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	22
3.1.1. Jenis Penelitian	22
3.1.2. Lokasi Penelitian	22
3.1.3. Waktu Penelitian	22
3.2. Populasi dan Sampel	23
3.2.1. Populasi	23
3.2.2. Sampel	23

3.3. Jenis dan Sumber Data	24
3.3.1. Jenis Data	24
3.3.2. Sumber Data.....	24
3.4. Defenisi Operasional	25
3.5. Teknik Pengumpulan Data	25
3.6. Teknik Analisis Data	26
3.6.1. Uji Kualitas Data.....	26
3.6.2. Uji Asumsi Klasik	27
3.6.3. Uji Analisi Regresi Linear Berganda	29
3.6.4. Uji Hipotesis	39
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Sejarah Singkat Kecamatan Percut Sei Tuan	32
4.2. Penyusunan dan Penyebaran Kuesioner.....	33
4.2.1. Penyusunan Kuesioner	33
4.2.2. Penyebaran Kuesioner	34
4.2.3. Karakteristik Responden.....	34
4.3. Hasil Analisis Data.....	36
4.3.1. Uji Statistik Deskriptif.....	36
4.3.2. Uji Kualitas Data	37
4.3.3. Uji Asumsi Klasik	40
4.3.4. Uji Regresi Linear Berganda	43
4.4. Uji Hipotesis.....	44
4.4.1. Uji Statistik t (Uji Parsial)	44
4.4.2. Uji Statistik F (Uji Simultan).....	44
4.4.3. Uji Koefisien Determinasi R^2	45
4.5. Pembahasan Hasil Penelitian	46
4.5.1. Pengaruh Penerapan SISKEUDES terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	46
4.5.2. Pengaruh SPIP terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	47
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	50
5.2. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Daftar penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian	23
Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel	25
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	34
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	35
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	35
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif	36
Tabel 4.5 Uji Validitas Masing – Masing Variabel	38
Tabel 4.6 Uji Reliabilitas Masing–Masing Variabel	39
Tabel 4.7 Uji Normalitas.....	40
Tabel 4.8 Uji Multikolinieritas.....	41
Tabel 4.9 Analisis Regresi Linear Berganda.....	43
Tabel 4.10 Hasil uji Statistik t.....	44
Tabel 4.11 Uji f	45
Tabel 4.12 Uji R ₂	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konsep penelitian	21
Gambar 4.1 Uji Heterokedastisitas	42



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	54
Lampiran 2 Hasil Uji Statistik.....	63
Lampiran 3 Hasil Uji Hipotesis.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menunjukkan desa mendapatkan prioritas pembangunan nasional. Undang-undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dan juga belum adanya sistem pengawasan yang komprehensif terhadap pengelolaan dana desa, menyebabkan terdapatnya kebebasan bagi pengelola keuangan dana desa terkait kebijakan penganggaran meliputi perencanaan yang efektif dan efisiensi, pelaksanaan yang terawasi, dan pertanggungjawaban yang dapat diandalkan sehingga berakibat banyaknya tindakan penyalahgunaan dana desa.

Pemerintahan desa sebagai entitas pelapor yang mengelolah segala sumber kekayaan desa meliputi keuangan desa, memiliki kewajiban untuk membuat dan melaporkan laporan keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Rohman, dkk, (2018:279) laporan pertanggungjawaban pemerintah desa

merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah desa kepada pemangku kepentingan atas pelaksana anggaran pendapatan dan belanja desa. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa kepada publik yang harus mencerminkan keadaan desa yang sesungguhnya. Akuntabilitas diharapkan mampu memperbaiki kinerja pemerintahan desa sehingga pengelolaan dana desa menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006) dalam Arfiansyah (2020).

Beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas diantaranya penggunaan teknologi informasi dan pengawasan atau pengendalian dalam pengolahan dana desa yang mempengaruhi akuntabilitas. Sistem keuangan khusus untuk pemerintah desa dalam pengolahan keuangan desa adalah Aplikasi sistem keuangan desa (SisKeuDes).

Aplikasi sistem keuangan desa (SisKeuDes) merupakan aplikasi yang dikembangkan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang bertujuan untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali/tolak ukur pengolahan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang. Hal tersebut meliputi data-data yang diinput dalam SisKeuDes yaitu (1) profil desa

,(2) penganggaran, (3) penatausahaan, (4) laporan keuangan desa. Dengan pengembangan aplikasi sistem keuangan desa (SisKeuDes) diharapkan desa-desa di seluruh Indonesia untuk dapat menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (SisKeuDes) guna mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Sumatra utara tahun 2019 dari 5.417 desa yang ada di lingkungan provinsi Sumatra Utara, sebanyak 5.412 desa atau 99,91% sudah menggunakan aplikasi SisKeuDes.

Selain faktor penggunaan sistem informasi teknologi berupa sistem keuangan desa (SisKeuDes), sebagai perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperlukannya sistem Pengendalian internal. Berdasarkan peraturan pemerintah No 60 tahun 2008 sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undang. Selanjutnya sistem pengendalian intern pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah dituntut untuk mendorong keterbukaan dan akuntabilitas keuangan desa dengan pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan ketentuan pasal 24 huruf g UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berasaskan akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas/program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat. Artinya akuntabilitas dapat menjadi alat pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

Berdasarkan media online Utama News.com yang dipublish pada jumat, 23 Agustus 2019 soal realisasi laporan dana desa kepala desa Tembung yang di nilai tidak transparan . Dijelaskan bahwa masyarakat menilai Kades Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan tidak transparansi dalam mempublikasikan realisasi pengolahan dana desa yang dibuktikan dengan perbedaan pelaporan pelaksanaan dana desa dengan laporan pertanggungjawaban dana desanya. Selanjutnya hal ini kemudian relevan dengan Media online Tribun-Medan yang diterbitkan pada senin, 18 Desember 2017 yang menyatakan adanya Kades Percut Sei Tuan yang sudah ditahan oleh kejaksaan Negeri Deliserdang atas kasus korupsi dana desa yang belum mendapatkan sanksi terhadap penyelewengan dana desa yang dilaporkannya. Selanjutnya menurut ICW (*Indonesia Corruption Watch*) tingkat korupsi dana desa mengalami peningkatan yang signifikan, dimana korupsi Dana Desa selama 2015-2018 mencapai 252 kasus.dan sebanyak 214 kepala desa tersangkut kasus korupsi selama periode tersebut.ICW menyebutkan beberapa penyebab Kasus-kasus korupsi dana desa ini meliputi penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, pengelembungan anggaran, dan suap.

Sehingga berdasarkan isu permasalahan di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh penerapan sistem keuangan desa**

dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ?
2. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
3. Apakah penerapan sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat antara lain :

1. **Bagi peneliti**, menambah pengetahuan dan wawasan penulis berkaitan dengan pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. **Pemerintahan Desa**, diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola dana desa.
3. **Akademisi**, dapat menjadi referensi informasi bagi pihak akademis terutama dalam melakukan penelitian sejenis atau selanjutnya.

BAB II **LANDASAN TEORI**

2.1. Penerapan Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes)

2.1.1. Pengertian Penerapan Sistem Keuangan Desa

Menurut Mufti Arief Arfiansyah (2017) “Sistem keuangan khusus untuk pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes). Dimana Aplikasi SisKeuDes merupakan penerapan teknologi informasi berupa aplikasi yang berkonsep akuntabilitas dalam mempertanggung-jawabkan keuangan desa. SisKeuDes merupakan suatu sistem yang berbasis komputerisasi. Dalam pelaksanaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 yakni pengolahan Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan sejumlah uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berpengaruh dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di desa. Dimana keuangan desa diperoleh dari pendapatan asli desa yang harus dikelola dengan baik dan jujur agar tercapainya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Pemerintah desa guna membentuk kebijakan didalam pengelolaan keuangan desa, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meluncurkan salah satu aplikasi yang bermanfaat guna meningkatkan mutu dari kualitas tata kelola keuangan desa. Untuk melanjutkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan memalui dana desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengeluarkan aplikasi sistem keuangan desa (SisKeuDes) pada Juli tahun 2015 lalu.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) adalah aplikasi yang diluncurkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa agar lebih baik kedepannya. Didalam SisKeuDes terdapat program yang ada didalam aplikasi pengelola keuangan desa yang dibuat semudah mungkin menggunakan *User Friendly* untuk mempermudah penggunaannya dalam pengoperasian aplikasi sistem keuangan desa ini (SisKeuDes). Menurut Sulina,dkk (2017) dalam Novyasaki,dkk perkembangan teknologi dan informasi saat ini sudah meningkat, badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) selaku penganjur mandate untuk melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan desa, mengembangkan suatu aplikasi untuk pengelolaan keuangan desa yaitu sistem keuangan desa atau bisa di sebut SISKEUDES. Penerapan sistem keuangan desa(SISKEUDES) untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan, selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang. Sehingga sistem keuangan desa memudahkan pemerintah desa dalam mengelolah dan menyusun laporan keuangan atas penggunaan dana desa.

2.1.2. Tujuan Penerapan Sistem Keuangan Desa

Menurut Martini,dkk (2019) Tujuan dibuat nya SISKEUDES adalah untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif, dan efisien. Penggunaan SISKEUDES merupakan suatu bentuk

perkembangan dari sistem informasi akuntansi (SIA). Menurut Novita (2016) dalam Martini,dkk (2019) “SIA adalah suatu aktivitas,data,dokumen,dan teknologi yang keterkaitannya dirancang untuk mengumpulkan dan memproses data, sampai dengan menyajikan informasi kepada para pengambil keputusan di internal organisasi dan eksternal organisasi.”

Menurut Martini, dkk (2019) Program ini bertujuan melaksanakan pelatihan dan pendampingan untuk penerapan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa. Secara khusus bertujuan:

1. Melatih dan mendampingi pengoprasian dalam penerapan aplikasi SISKEUDES terutama pengimputan data penganggaran dan penatausahaan. Tahap penganggaran dan penatausahaan merupakan bagian sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa. Pada tahap ini penggunaan keuangan desa akan terlihat peruntukannya apakah sesuai dengan yang telah dianggarkan.
2. Untuk pendampingan dalam menghadapi kendala yang terjadi dilapangan dalam proses penerapan aplikasi SISKEUDES di desa.

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa SISKEUDES sangat berperan dalam pengelolaan dana desa dan membantu untuk pengelolaan dana desa yang mana secara sistematis dalam menggunakan teknologi informasi. Menurut Sulina, dkk (2017) dalam Martini, dkk (2019) “SISKEUDES memberikan dampak pada para pegawai yaitu memberikan motivasi untuk bekerja dengan baik dan lancer , kegiatan oprasional yang lebih terata secara administrative, mengurangi adanya kecurangan ,

meningkatkan kinerja pegawai ,dan dapat menciptakan laporan keuangan yang akuntabel”.

2.1.3. Indikator Penerapan Sistem Keuangan Desa

Menurut Muhammad Anur Ridwan (2019) terdapat 3 komponen dalam SISKEUDES untuk menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan,diantaranya :

- 1) Integritas keuangan, yaitu kejujuran,keterpaduan,kebulatan dan keutuhan agar laporan keuangan dapat diandalkan,kualitas informasi yang terkandung di dalamnya harus menjamin bahwa informasi secara wajar bebas dari kesalahan dan secara jujur menyajikan apa yang dimaksud untuk dinyatakan.
- 2) Pengungkapan, yaitu penyampaian suatu informasi keuangan yang berkaitan dengan perusahaan di laporan keuangan,yang biasanya ada dilaporan tahunan.
- 3) Ketaatan terhadap peraturan perundangan, yaitu suatu pengelola organisasi harus mentaati semua peraturan perundangan yang ada, dimana hal ini untuk mendorong prinsip akuntabilitas.

2.2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

2.2.1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem pengendalian internal pemerintahan adalah upaya dalam melakukan pengawasan untuk melindungi aset negara dari tindakan penyelewangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam

pemerintahan baik untuk kepentingan individu maupun kelompok. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga tujuan dari sistem pengendalian tersebut mampu membentuk budaya pengawasan terhadap pemerintahan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang baik kepada publik.

Sistem pengendalian internal pemerintah dirancang untuk pengawasan dimana tujuan dan sasaran yang dicapai akan lebih maksimal dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. SPIP sendiri dibentuk tidak hanya untuk pemebntukan mekanisme administrasi tetapi merupakan upaya dalam melakukan perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah dalam perbaikan menjadi lebih baik. Didalam PP Nomor 60 Tahun 2008 terdapat 5 (lima) unsur sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) diantaranya : lingkungan pengendalian, penilaia risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Lingkungan Pengendalian merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku yang positif dan kondusif sebagai dampak dari lingkungan pengendalian yang baik. Dengan penegakkan

integritas dan nilai etika, kepemimpinan, dan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan mampu menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif.

- b. Penilaian risiko adalah upaya yang dilakukan untuk menilai dan mengidentifikasi risiko yang ada kemudian dianalisis sejauh mana dampak risiko yang telah di indentifikasi terhadap pencapaian tujuan.
- c. Kegiatan Pengendalian yaitu dimana pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggaraan kegiatan pengendalian atas tugas dan fungsi instansi pemerintah sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat.
- d. Informasi dan Komunikasi merupakan upaya dalam mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat sehingga dapat menyediakan informasi dengan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. Selain itu diharapkan adanya sistem pengelolaan, pengembangan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus untuk menghasilkan informasi berkualitas
- e. Pemantauan pengendalian intern yaitu upaya pemantauan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

2.2.2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Dalam proses pengelolaan dana desa pemerintah desa diharapkan dapat mengelola untuk tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga dapat berdampak pada peningkatan ekonomi desa. Pemerintah desa juga dituntut oleh undang-undang untuk dapat mempertanggungjawaban pengelolaan dana desa kepada pemerintahan dan masyarakat yang mencerminkan keadaan desa dengan sesungguhnya. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Didalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP juga di atur untuk dapat mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel pemerintahan/pemerintah desa wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) diantaranya sebagai berikut ini :

- a. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mencegah terjadinya tindakan KKN.
- b. Memenuhi tanggungjawaban entitas sebagai pelaporan untuk menyajikan informasi secara wajar sesuai dengan SAP yang berlaku.
- c. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien.

Mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan secara akurat untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

2.2.3. Indikator Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan, terdapat 5 unsur komponen SPIP, diantaranya :

1. Lingkungan pengendalian,
2. Penilaian risiko,
3. Aktivitas pengendalian,
4. Informasi dan komunikasi, dan
5. Pemantauan Pengendalian

2.3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.3.1. Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dana desa (DD) adalah pendapatan keuangan desa yang di anggarkan oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan sumber daya yg ada di desa. Adapun hal tersebut tertuang didalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 yang menjelaskan tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang menunjukkan bahwa desa mendapatkan prioritas pembangunan nasional, dimana tujuan undang-undang tersebut untuk meningkatkan kemandirian desa dan masyarakat melalui program-program dan kegiatan pembangunan desa serta

pemberdayaan masyarakat khususnya yang ada di desa. Sehingga, pertanggungjawaban pengelolaan dana desa harus dapat mencerminkan pelaksanaannya di desa.

Menurut Moenek (2019:109) “untuk mendukung penguatan dalam administrasi pemerintah dan pengelolaan keuangan yang baik termasuk ditingkat daerah adalah dengan meningkatkan transparansi, integritas dan akuntabilitas, sebagaimana lembaga pemerintah tentunya hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik”. Menurut lembaga administrasi negara dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan RI (2000:12) “Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.”

Menurut Mardiasmo (2018:27) “akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas laporan penggunaan dana desa sebagai alat evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat atas kinerja pemerintah desa untuk pengolahan dana desa.

2.3.2. Tujuan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan karakteristik *Good Governance* menurut *United National Development Program* (UNDP) dalam Mardiasmo (2018:23), terdapat 9 (Sembilan) karakteristik diantaranya *participations, rule of Law, Transparency, Consensus Orientation, Equity, Efficiency and Effectiveness, accountability* dan *strategic vision* dimana untuk mencapai *good government* atau tata kelola pemerintahan yang baik minimal harus mampu menerapkan 3 (tiga) karakteristik diantaranya adalah Transparansi, Akuntabilitas public, dan *value for money* (*economy, efficiency, dan effectiveness*).

Didalam Moenek, (2019:111) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SKIP) untuk mendorong terciptanya akuntabilitas public, beberapa tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan instansi atau lembaga pemerintahan yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisiensi, dan responsif pada aspirasi masyarakat dan lingkungan.
2. Terwujudnya pemerintahan yang transparansi.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terciptanya Kepercayaan masyarakat pada pemerintahannya.

2.3.3. Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2018:28) terdapat 4 (empat) unsur akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, yaitu akuntabilitas kejujuran yang terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) yang di miliki, sedangkan akuntabilitas hokum adalah adanya kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sumber dana public.
2. Akuntabilitas Proses, yaitu berkaitan dengan prosedur yang mudah dan cepat untuk dipahami dalam melaksanakan tugas dalam hal sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas Program, yaitu pertimbangan mengenai tujuan apakah dapat dicapai atau tidak, dan memperhatikan tujuan alternative lainnya yang dapat menghislkan hasil yang lebih optimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan, yaitu pertanggungjawaban kepada pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

2.4. Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem Keuangan Desa dibuat sebagai pedoman pemerintahan dalam mengelolah sumber daya yang dimiliki oleh desa salah satu adalah dana desa.dengan ada nya penerapan sistem keuangan desa dapat mempermudah dalam

pengelolaan dana desa dan berkonsep akuntabilitas yang mampu mempertanggungjawabkan kemana dana desa digunakan. Adapun aplikasi SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa) yang digunakan untuk mempermudah aparat desa untuk melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam hal tersebut tertuang dalam hasil penelitian Dinda Novyasari Maharani¹, Fajar Syaiful Akbar² (2020) dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan SisKeuDes di desa banjaragung membantu proses akuntabilitas desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat dengan adanya laporan keuangan desa yang dihasilkan oleh aplikasi ini. Berdasarkan temuan ini maka hipotesis yang diajukan yaitu : Penerapan sistem keuangan desa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.5. Pengaruh Sistem pengendalian Internal Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pentingnya sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas dimana sistem pengendalian intern merupakan faktor yang penting dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa, berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 dimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk memberi keyakinan yang memadai tentang ; kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan. Dalam hal tersebut tertuang dalam hasil penelitian Dinda Novyasari Maharani (2020) menyebutkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.6. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

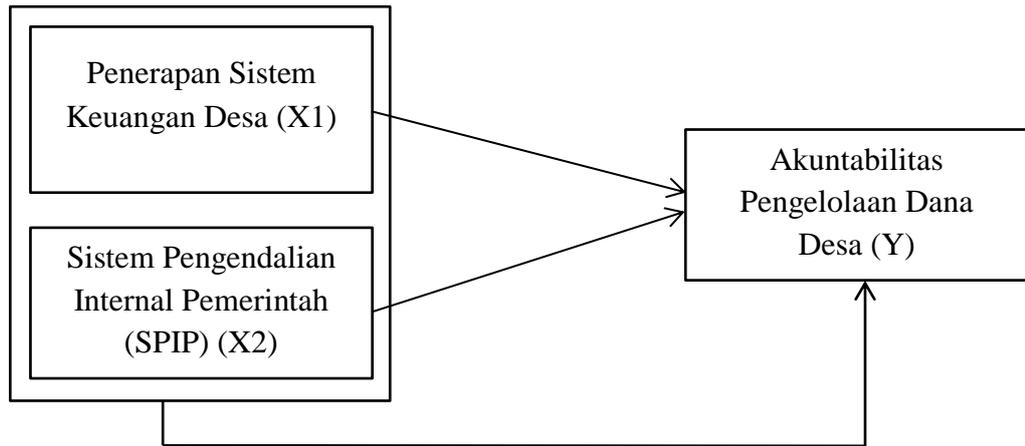
No	Nama peneliti,tahun	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Mufti Arief Arfiansyah (2020)	Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1.Sitem keuangan desa (SISKEUDES) mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. 2. Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2	Muhammad Nur Aziiz,Sawitri Dwi Prastiti (2019)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa	Kopetensi aparat desa,pemanfaatan teknologi informasi dan SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.implikasi praktis hasil penelitian ini bagi aparat pemerintahan adalah untuk meningkatkan kompetensi aparat desa melalui pelatihan SISKEUDES dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Secara teoritis,akuntabilitas keuangan sector public dapat pula dijelaskan melalui teori kepatuhan dan konsep etika.
3	Arif Widyatama, Lola Novita dan Diarespati (2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	Variable kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ADD,seandainya variable sistem pengendalian internal memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ADD.
4	Gusti Ayu Trisha Sulina, 1Made Arie Wahyuni, 2Putu Sukma Kurniawan (2017)	Peranan Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)	(1) Penginputan data pada sistem keuangan desa (SisKeuDes) harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem; (2) Cara untuk mengintegrasikan sumber daya manusia (SDM) yang rendah yaitu melalui pendampingan dan pelatihan; (3) Penerapan sistem keuangan desa (SisKeuDes) memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai. Dari hal tersebut maka penerapan sistem keuangan desa (SisKeuDes) memiliki peran yang penting terhadap kinerja pemerintah desa yang dirasakan langsung oleh para pegawai desa di Desa Kaba-kaba. Hal ini sesuai

			dengan tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa (SisKeuDes) yaitu untuk membantu kerja pegawai desa.
5	Dinda Novyasaki Maharani1, Fajar Syaiful Akbar2 (2020)	Penerapan Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa	keberadaan SISKEUDES di Desa Banjaragung membantu proses akuntabilitas desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat dengan adanya laporan keuangan desa yang dihasilkan oleh aplikasi ini. Desa Banjaragung telah menerapkan SISKEUDES yang disesuaikan dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Akuntansi Keuangan Desa sehingga dapat dipertanggungjawabkan kualitas pelaporannya berdasarkan pada akuntansi desa yang berlaku.

Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada variabel independen peneliti menggunakan variable independen terdiri dari penerapan sistem keuangan desa dan sistem penengendalian intern pemerintah, sedangkan peneliti lain menggunakan variabel independen yaitu kompetensi dan kinerja pemerintah desa.

2.7. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konseptual adalah hubungan antara konsep yang dibangun berdasarkan hasil-hasil studi empiris terdahulu sebagai pedoman dalam melakukan penelitian Sehingga didalam penelitian ini kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1
Kerangka Konsep Penelitian

2.8. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu kesimpulan yang belum final atau pernyataan sementara untuk memecahkan masalah yang harus diuji kebenarannya Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Penerapan Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- H₂ : Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- H₃ : Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan metode asosiatif. Menurut Sugiyono (2019), “pendekatan metode asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih”. Sehingga tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan secara linear antara variabel bebas yaitu Penerapan sistem keuangan Desa (SisKeuDes) dan Sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap variabel terikat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

3.1.2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilaksanakan pada Desa yang terdapat di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan data yang terdapat di Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Deli Serdang, pada Kecamatan Percut Sei Tuan terdapat 18 (delapan belas) Desa.

3.1.3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan mulai Oktober 2020 sampai dengan Maret 2021, dengan rincian waktu penelitian dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian

Tahapan Penelitian	Okt 2020	Nov 2020	Des 2020	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Des 2021	Mar 2022
Pengajuan Judul								
Pencarian Data dan Penyusunan Proposal								
Penyerahan dan Bimbingan Proposal								
Seminar Proposal								
Revisi Proposal								
Pengambilan dan Pengolahan Data								
Bimbingan Skripsi								
Seminar Hasil								
Sidang Meja Hijau								

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Menurut Sujarweni, (2020:65) populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang akan diteliti adalah seluruh Aparat Pemerintah Desa yang terdapat di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

3.2.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah populasi yang dijadikan responden. Menurut Sujarweni (2020:65) sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk

penelitian. Sehingga sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat pemerintahan desa yang terdapat di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, yang terdiri dari Kepala Desa sejumlah 18, Sekertaris Desa sejumlah 18, dan Bendahara Desa sejumlah 18 yang tersebar di Kecamatan Percut Sei Tuan. Berdasarkan sampel diatas maka jumlah sampel pada penelitian ini adalah 54 sampel.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, di mana menurut Sugiyono (2019) “data kuantitatif adalah data yang diukur dan dihitung secara langsung berupa informasi atau penjelasan yang kemudian dinyatakan dengan angka”.

3.3.2. Sumber Data

Sumber data adalah data yang diperoleh dari sumbernya yang memiliki informasi yang dibutuhkan. Menurut Sujarweni (2020:73) “sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sangadji dan Sopiha (2010:171), “data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara)”.

3.4. Defenisi Opersional

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Internal, dan variebel terikat yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Defenisi operasionalnya akan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Defenisi Operasional Variabel

Varibel	Defenisi Variabel	Indikator	Skala
Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (X1)	Sistem Keuangan Desa adalah aplikasi berbasis komputer sistem keuangan desa yang diterbitkan oleh BPKP dengan tujuan untuk membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.	1. Integritas Keuangan 2. Pengungkapan 3. Taat Terhadap Peraturan	Likert
Sisten Pengendalian Internal Pemerintah (X2)	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah upaya yang dilakukan dalam melindungi aset negara dan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Aktivitas Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian	Likert
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa berupa laporan keuangan desa yang kemudian menjadi alat evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat atas kinerja pemerintah desa dalam mengelolah dana desa.	1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum 2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan	Likert

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini menggunakan teknik Kuesioner (angket), yaitu mengumpulkan data dengan cara

mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan variabel penelitian kepada responden yang diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut (Sugiyono,2017:14). Kemudian jawaban dari responden di ukur menggunakan skala likert dengan nilai 1 sampai 5.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara untuk melakukan pengelolaan data yang diperoleh dari instrument penelitian yang telah di isi oleh responden untuk di uji dan menghasilkan informasi sebagai kesimpulan hasil penelitian ini.

3.6.1. Uji Kualitas Data

Tujuan uji kualitas data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah data yang benar-benar valid dan reliabel, sehingga dapat dilakukan uji data selanjutnya.

1. Uji Validitas

Menurut Suliyanto (2018), uji validitas merupakan suatu alat ukur yang dinyatakan dengan valid jika instrumen tersebut “benar-benar” benar untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Penggunaan metode koefisien korelasi pearson dengan kriteria jika r hitung $>$ r tabel pada taraf signifikan 0,05, maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya, jika r hitung $<$ r tabel maka pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Zikmund, (2003) dalam Zulkarnain Lubis, (2017) menyebutkan bahwa uji reliabilitas merupakan suatu cara untuk menguji konsistensi dari suatu alat ukur yang akan digunakan, dalam upaya yang berbeda untuk mengukur hal yang sama berkumpul dititik yang sama. Uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* untuk menentukan tingkat kekonsistenan dari alat ukur yang dipakai, yaitu $> 0,6$. Suatu alat ukur dinyatakan reliabel jika *cronbach alpha* nya $> 0,6$.

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan didalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel yang di teliti memiliki distribusi normal. Menurut Ghozali, (2013) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui apakah data yang kita miliki normal atau tidak dengan menggunakan uji statistik KolmogorovSmirnov (KS), dijelaskan sebagai berikut :

- a) Jika nilai probabilitas (p-value) masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal.

- b) Jika nilai probabilitas (p-value) masing-masing variabel independen lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antarvariabel bebas (independen), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2013). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dengan melihat *Tolerance* dan Nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* di jelaskan sebagai berikut :

- a) Jika nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 berarti maka model regresi bebas dari multikolinearitas.
- b) Jika nilai VIF lebih dari 10, maka model regresi bebas dari multikolinearitas.

1. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Merthajaya, 2020:210). Menurut Gozali (2013) model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians yang tetap dari satu pengamatan kepengamatan yang lain disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan cara melihat grafik *scatterplot* antara SRESID DAN ZPRED dimana tidak adanya titik-titik yang membentuk pola tertentu seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar.

3.6.3. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda merupakan model analisis statistika yang memodelkan hubungan antara dua atau lebih variabel bebas (X) dan terikat (Y). Rumus regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y	= Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
a	= Bilangan Konstanta
b1, b2	= Koefisien garis regresi
X1	= Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
X2	= Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
e	= error

3.6.4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun uji hipotesis yaitu uji parsial, uji simultan dan uji koefisien determinasi.

1. Uji Statistika t (parsial)

Menurut Ghozali (2013), uji statistika t merupakan uji yang bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan nilai tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05, dikatakan signifikan apabila nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Pengujian ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Jika nilai t hitung > t tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
- b) Jika nilai t hitung < t tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

2. Uji Statistika F (simultan)

Uji statistika F atau uji simultan merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen didalam penelitian ini secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini relevan dengan pernyataan Ghozali, (2013) uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel atau melihat tingkat signifikan pada output SPSS. Jika nilai sig < 0,05 maka terdapat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara nol atau satu. Jika nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya jika nilai R^2 mendekati angka 1 berarti variabel independen maka semakin kuat variabel independen dalam menjelaskan atau berpengaruh terhadap variabel dependen.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab 4 dalam penelitian Pengaruh penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, maka dapat disimpulkan :

1. Penerapan sistem keuangan desan (siskeudes) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli serdang.
2. Sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desan pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
3. Penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
4. penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) , sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Percut Sei Tua Kabupaten Deli Serdang.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun beberapa saran yang penulis sampaikan dan diharapkan dapat bermanfaat diantaranya sebagai berikut.

1. Bagi akademis, dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian selanjutnya baik dengan penelitian yang sejenis pada desa-desa lainnya. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya atau faktor yang dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Bagi pemerintahan, dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan memperhatikan faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah, Mufti, Arief. 2019. **Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**. *Journal of Islamic Finance and Accounting*. 3(01). Hal 68-82.
- Aziiz ,Muhammad Nur. & Prastiti, Sawitri Dwi .2019. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa**. *Jurnal Akuntansi Aktual*. 6 (2), hlm. 280-344.
- Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Deli Serdang.2020. Kecamatan Pancur Batu Dalam Angka. <https://deliserdangkab.bps.go.id/publikasi.html>
- Ghozali, Imam. 2013. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Indonesia Corruption Watch (ICW).2019. **ICW Sebut Korupsi Dana Desa Kian Meningkat**.CNNIndonesia.<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat>.diakses jam 1.40pm.tanggal 4/12/2019.
- Mada,Sarifudin., Kalang,Lintje., & Gamaliel,Hendrik. 2017. **Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo**. *Jurnal riset akuntansi dan auditing*. 8(2):106-115.
- Mardiasmo (2018) **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta. CV Andi Offset.
- Moenek, Reydonnyzar., & Suwanda, Dadang (2019) **Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah**. Bandung.PT. Remaja Rosdakarya.
- Martini, Rita., Agustina, Resy., Fairuzdita, Hamira., & Murinda, Anggun Noval.2019. **Pengelolaan Keuangan Berbasis Sistem Keuangan Desa**. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM)*. 25 (2). Hal :69-74.
- Maharani, Dinda Noviasary., & Akbar, Fajar Syaiful.2020. **Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Mewujudkan Akutabilitas Pemerintahan Desa**. *BAJ (behavioral accounting journal)*. 3(1). Hal :1-20.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang **Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)**.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SKIP).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 113 Tahun 2014 tentang **Pengelolaan Keuangan Desa**.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang **Dana Desa**.

Ridwa, Muhammad Anur. 2019. **Analisis Peran Sistem Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam**.

Sarifudin Mada, dkk, (2017), **Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo/107**.

Sulina, Gusti Ayu Trisa, Wahyuni, Made Ari, & Kurniawan, Putu Sukma. 2017. **Perana Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa**. E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. 8 (2). Hal : 1-12.

Sangadji & Shopiah. 2010. **Metodologi Penelitian**. Yogyakarta.
Sugiyono (2019) **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. Bandung. Alfabet.

Sujarweni, V. Wiratna. 2020. **Metodologi Penelitian**. Yogyakarta. PT. Pustaka Baru Press.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang **Desa**.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang **Perimbangan Antar Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**.

Widyatama, *et al.* 2017. **Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)** / *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2 (2017): 1-20.

Zulkarnain, Sutrisno, & Hasudungan, A. (2017). **Panduan Praktis Praktikum SPSS**. Pusat Komputer Universitas Medan Area:Medan.



1. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth:
Bapak/Ibu/Sdr/i Pemerintah Desa
Di Tempat

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal
NPM : 178330336
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area

Memohon kesediaan dari Bapak/Ibu/Sdr/i untuk kiranya dapat berpartisipasi dalam mengisi kuesioner penelitian ini, berkaitan dengan penyusunan skripsi yang saya lakukan dalam rangka menyelesaikan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Medan Area. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun akademis dan pemerintah desa. Oleh karena itu, mohon kesediannya untuk mengisi/menjawab kuesioner ini sesuai dengan sejujurnya. Kuesioner ini hanya untuk kepentingan skripsi tidak untuk dipublikasikan, dan kerahasiaan data yang diisi akan tetap dijaga. Atas kerjasama yang baik dan kesungguhan Bapak/Ibu/Sdr/i dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Medan, Februari 2021
Hormat Saya,

MUHAMMAD IQBAL
NPM 178330336

Identitas Responden

1. Nama :(boleh tidak di isi)
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Usia : Tahun
4. Tingkat Pendidikan : SD SMP SMA/SMK
 D3 S1 S2
Lain-lain
5. Jabatan : Kepala Desa
 Sekretaris Desa
 Kepala Urusan Keuangan
6. Nama Desa :

Petunjuk Pengisian

Pilihlah jawaban dibawah ini dengan memberi tanda checklist (✓) pada salah satu jawaban yang paling mendekati pendapatan anda

- Penilaian** : SS = Sangat Setuju
S = Setuju
N = Netral/Ragu-ragu
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

NO	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Sumber-sumber penggunaan dana pada Pemdes telah diketahui oleh pemangku kepentingan selaku pengguna laporan keuangan					
2	Penyusunan anggaran Pemdes dilakukan sesuai prinsip-prinsip penganggaran					
3	Pelaksanaan belanja desa didasarkan pada prinsip hemat, efektif dan efisien					
4	Pemdes telah memiliki kecukupan sistem informasi akuntansi dalam mengelola keuangan desa					
5	Pemdes telah melaksanakan prosedur administrasi dalam mengelola keuangan desa					
6	Selalu ada pengawasan terhadap kegiatan/program Pemdes					
7	Pelaporan hasil kegiatan/program kerja Pemdes disusun secara tepat waktu					
8	Pemdes telah memiliki kesesuaian antara target dengan pencapaian kegiatan/program yang dilakukan					
9	Pemdes telah menjalankan kebijakan ke dalam sasaran yang harus dicapai					
10	Pemdes memiliki sasaran dan tujuan yang jelas dari kebijakan yang telah dibuat					
11	Kebijakan yang dibuat oleh Pemdes dikembangkan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas yang lebih baik					

PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)

NO	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS
1	SISKEUDES mampu meminimalisir terjadinya kecurangan laporan keuangan desa.					
2	SISKEUDES mampu meningkatkan tingkat transparansi laporan keuangan.					
3	SISKEUDES mampu melampirkan bukti transaksi (nota, faktur, kwitansi, dll) dalam laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab.					

4	SISKEUDES memudahkan dalam pengklasifikasian transaksi dibandingkan sistem manual.					
5	SISKEUDES mempermudah dalam menyampaikan informasi terkait laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, neraca dll dalam website resmi.					
6	SISKEUDES adalah sistem yang menghasilkan output laporan yang lengkap dan mudah dipahami.					
7	SISKEUDES adalah sistem yang memiliki respon dan waktu penyelesaian yang efektif dan efisien					
8	SISKEUDES adalah sistem yang dapat diandalkan, terkait dengan kemampuan sistem untuk membackup data bila terjadi kesalahan baik input maupun posting .					
9	SISKEUDES meningkatkan ketaatan belanja berdasarkan sumber dana.					
10	SISKEUDES meningkatkan ketaatan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan pajak.					
11	SISKEUDES mampu menyajikan laporan keuangan dengan wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005.					

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH

NO	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Instansi/lembaga tempat saya bekerja telah menerapkan kode etik secara tertulis.					
2	Pimpinan Instansi/lembaga di tempat Saya bekerja telah memberikan contoh dalam berperilaku mengikuti kode etik					
3	Instansi/lembaga tempat Saya bekerja telah menerapkan penentuan batas dan penentuan toleransi.					
4	Instansi/lembaga tempat saya bekerja telah menerapkan pengendalian intern dan manajemen terhadap Resiko.					
5	Setiap transaksi dan aktivitas ditempat Saya bekerja telah didukung dengan otorisasi dari pihak yang berwenang.					

6	Instansi/lembaga tempat Saya bekerja telah menerapkan pemisahan tugas yang memadai					
7	Instansi/lembaga tempat Saya bekerja telah menerapkan sistem informasi untuk melaksanakan tanggung jawab					
8	Instansi/lembaga tempat Saya bekerja telah melaksanakan sistem akuntansi yang memungkinkan audit					
9	Dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi					

2.. Hasil Jawaban Kuesioner

a. Jawaban Kuesioner Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Responden	Pertanyaan Kuesioner										
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11
1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	5	5	5	4	3	3	4	4
5	4	4	4	5	5	5	4	3	3	5	5
6	5	5	5	4	4	4	4	3	3	4	4
7	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5
8	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5
9	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4
14	3	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4
15	3	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4
16	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
21	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4
23	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4
24	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5

26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
28	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5
29	4	4	4	5	4	5	3	4	4	3	5
30	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	5
31	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4
35	5	4	5	5	5	4	3	4	4	4	4
36	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4
37	3	4	4	4	4	5	3	3	5	5	5
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
40	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
42	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
43	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
44	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
46	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
47	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
48	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
49	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
50	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
51	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
52	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
53	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
54	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4

b. Jawaban Kuesioner Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Responden	Pertanyaan Kuesioner								
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	3	3	4	4	4
5	4	4	4	4	3	3	4	4	4
6	4	4	4	4	3	3	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4

9	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	4	5	4	4	4	5	5	4	5
14	5	5	5	4	4	4	4	4	4
15	5	5	5	5	5	4	4	4	4
16	4	4	2	4	2	2	4	2	2
17	4	4	2	4	2	2	4	2	2
18	4	4	2	4	2	2	4	2	2
19	5	5	5	5	4	4	4	4	4
20	5	5	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	3	3	3	3	3
22	4	4	5	4	4	4	4	4	4
23	4	4	5	4	4	4	4	4	4
24	4	4	5	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	3	4	4	4	4	4	4	4	4
29	3	4	4	4	4	4	4	4	4
30	3	4	4	4	4	4	4	4	4
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	5	4	4	5	5	5	4	4	4
38	5	4	4	5	5	5	4	4	4
39	5	4	4	5	5	5	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4	3	3	3	3
44	4	4	4	4	4	3	3	3	3
45	4	4	4	4	4	3	3	3	3
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5

50	5	5	5	5	5	5	5	5	5
51	5	5	5	5	5	5	5	5	5
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4

c. Jawaban Kuesioner Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Responden	Pertanyaan Kuesioner										
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
7	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5
8	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5
9	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
14	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
15	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5
16	5	5	5	4	5	4	4	4	5	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
20	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
21	5	5	5	5	3	3	3	4	4	4	4
22	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
23	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
24	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
25	5	5	4	4	4	5	3	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5
28	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3
29	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3
35	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3
36	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3
37	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4
38	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4
39	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
43	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4
48	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
52	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
53	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
54	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4



Lampiran 2. Hasil Uji Statistik

Hasil Uji Validitas

a. Uji Validitas Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Correlations

	PertX1_1	PertX1_2	PertX1_3	PertX1_4	PertX1_5	PertX1_6	PertX1_7	PertX1_8	PertX1_9	PertX1_10	PertX1_11	Total_X1	
PertX1_1	Pearson Correlation	1	,475**	,619**	,317**	,320**	,176	,201	,322**	,163	,187	,108	,576**
	Sig. (1-tailed)		,000	,000	,010	,009	,101	,072	,009	,119	,088	,219	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
PertX1_2	Pearson Correlation	,475**	1	,707**	,299*	,175	,308*	,392**	,329**	,263*	,314*	,128	,611**
	Sig. (1-tailed)	,000		,000	,014	,103	,012	,002	,008	,027	,010	,178	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
PertX1_3	Pearson Correlation	,619**	,707**	1	,326**	,211	,213	,273*	,307*	,217	,237*	,016	,585**
	Sig. (1-tailed)	,000	,000		,008	,063	,061	,023	,012	,058	,042	,455	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
PertX1_4	Pearson Correlation	,317**	,299*	,326**	1	,725**	,655**	,392**	,397**	,343**	,314*	,367**	,692**
	Sig. (1-tailed)	,010	,014	,008		,000	,000	,002	,001	,006	,010	,003	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
PertX1_5	Pearson Correlation	,320**	,175	,211	,725**	1	,596**	,481**	,473**	,357**	,475**	,318**	,696**
	Sig. (1-tailed)	,009	,103	,063	,000		,000	,000	,000	,004	,000	,010	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
PertX1_6	Pearson Correlation	,176	,308*	,213	,655**	,596**	1	,512**	,395**	,552**	,489**	,626**	,731**
	Sig. (1-tailed)	,101	,012	,061	,000	,000		,000	,002	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
PertX1_7	Pearson Correlation	,201	,392**	,273*	,392**	,481**	,512**	1	,624**	,543**	,407**	,344**	,700**
	Sig. (1-tailed)	,072	,002	,023	,002	,000	,000		,000	,000	,001	,005	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54

PertX1_8	Pearson Correlation	,322**	,329**	,307*	,397**	,473**	,395**	,624**	1	,744**	,435**	,482**	,758**
	Sig. (1-tailed)	,009	,008	,012	,001	,000	,002	,000	,000	,000	,001	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
PertX1_9	Pearson Correlation	,163	,263*	,217	,343**	,357**	,552**	,543**	,744**	1	,511**	,536**	,704**
	Sig. (1-tailed)	,119	,027	,058	,006	,004	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
PertX1_10	Pearson Correlation	,187	,314*	,237*	,314*	,475**	,489**	,407**	,435**	,511**	1	,428**	,654**
	Sig. (1-tailed)	,088	,010	,042	,010	,000	,000	,001	,001	,000	,000	,001	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
PertX1_11	Pearson Correlation	,108	,128	,016	,367**	,318**	,626**	,344**	,482**	,536**	,428**	1	,578**
	Sig. (1-tailed)	,219	,178	,455	,003	,010	,000	,005	,000	,000	,001	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Total_X1	Pearson Correlation	,576**	,611**	,585**	,692**	,696**	,731**	,700**	,758**	,704**	,654**	,578**	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

b. Uji Validitas Ssitem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)

Correlations

	PertX2_1	PertX2_2	PertX2_3	PertX2_4	PertX2_5	PertX2_6	PertX2_7	PertX2_8	PertX2_9	Total_X2
PertX2_1 Pearson Correlation	1	,715	,434	,805	,521	,473	,440	,385	,365	,657
PertX2_1 Sig. (2-tailed)		,000	,001	,000	,000	,000	,001	,004	,007	,000
PertX2_1 N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
PertX2_2 Pearson Correlation	,715**	1	,544**	,658**	,464**	,479**	,656**	,494**	,538**	,710**
PertX2_2 Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
PertX2_2 N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
PertX2_3 Pearson Correlation	,434**	,544**	1	,474	,771**	,707**	,356**	,820**	,794	,831**

	Sig. (2-tailed)	,001	,000		,000	,000	,000	,008	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
PertX2_4	Pearson Correlation	,805**	,658**	,474**	1	,663**	,605**	,553**	,494**	,467**	,742**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
PertX2_5	Pearson Correlation	,521**	,464**	,771**	,663**	1	,913**	,417**	,800**	,780**	,891**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,002	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
PertX2_6	Pearson Correlation	,473**	,479**	,707**	,605**	,913**	1	,632**	,871**	,890**	,922**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
PertX2_7	Pearson Correlation	,440**	,656**	,356**	,553**	,417**	,632**	1	,667**	,710**	,712**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,008	,000	,002	,000		,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
PertX2_8	Pearson Correlation	,385**	,494**	,820**	,494**	,800**	,871**	,667**	1	,978**	,915**
	Sig. (2-tailed)	,004	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
PertX2_9	Pearson Correlation	,365**	,538**	,794**	,467**	,780**	,890**	,710**	,978**	1	,915**
	Sig. (2-tailed)	,007	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Total_X2	Pearson Correlation	,657**	,710**	,831**	,742**	,891**	,922**	,712**	,915**	,915**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Correlations

	Pert Y_1	Pert Y_2	Pert Y_3	Pert Y_4	Pert Y_5	Pert Y_6	Pert Y_7	Pert Y_8	Pert Y_9	Pert Y_10	Pert Y_11	Total_Y
Pertanyaan Y_1	1	,758**	,678**	,632**	,634**	,606**	,589**	,723**	,624**	,526**	,324*	,808**

	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,017	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Pertanyaan Y_2	Pearson Correlation	,758**	1	,925**	,565**	,405**	,395**	,363**	,504**	,630**	,500**	,574**	,742**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,002	,003	,007	,000	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Pertanyaan Y_3	Pearson Correlation	,678**	,925**	1	,565**	,405**	,395**	,420**	,504**	,630**	,500**	,635**	,750**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,002	,003	,002	,000	,000	,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Pertanyaan Y_4	Pearson Correlation	,632**	,565**	,565**	1	,650**	,608**	,496**	,670**	,735**	,642**	,307*	,791**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,024	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Pertanyaan Y_5	Pearson Correlation	,634**	,405**	,405**	,650**	1	,907**	,796**	,733**	,688**	,551**	,254	,827**
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,002	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,063	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Pertanyaan Y_6	Pearson Correlation	,606**	,395**	,395**	,608**	,907**	1	,755**	,682**	,622**	,553**	,315*	,807**
	Sig. (2-tailed)	,000	,003	,003	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,020	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Pertanyaan Y_7	Pearson Correlation	,589**	,363**	,420**	,496**	,796**	,755**	1	,725**	,690**	,611**	,353**	,801**
	Sig. (2-tailed)	,000	,007	,002	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,009	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Pertanyaan Y_8	Pearson Correlation	,723**	,504**	,504**	,670**	,733**	,682**	,725**	1	,744**	,677**	,363**	,850**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,007	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Pertanyaan Y_9	Pearson Correlation	,624**	,630**	,630**	,735**	,688**	,622**	,690**	,744**	1	,862**	,492**	,886**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54

Pertanyaan Y_10	Pearson Correlation	,526**	,500**	,500**	,642**	,551**	,553**	,611**	,677**	,862**	1	,581**	,805**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Pertanyaan Y_11	Pearson Correlation	,324*	,574**	,635**	,307*	,254	,315*	,353**	,363**	,492**	,581**	1	,595**
	Sig. (2-tailed)	,017	,000	,000	,024	,063	,020	,009	,007	,000	,000		,000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Total_Y	Pearson Correlation	,808**	,742**	,750**	,791**	,827**	,807**	,801**	,850**	,886**	,805**	,595**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4. Hasil Uji Reliabilitas

a. Uji Reliabilitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,760	12

b. Uji Reliabilitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,786	10

c. Uji Reliabilitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,778	12

Lampiran 3. Hasil Uji Hipotesis Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,546 ^a	,298	,271	4,17453

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	377,385	2	188,693	10,828	,000 ^b
	Residual	888,763	51	17,427		
	Total	1266,148	53			

a. Dependent Variable: Y

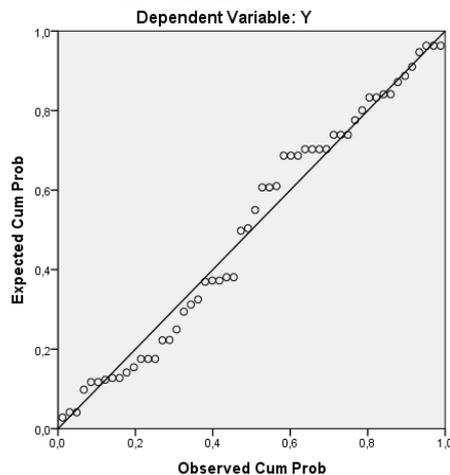
b. Predictors: (Constant), X2, X1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	14,048	8,235				1,706
1 X1	,358	,152	,277	2,349	,023	,989	1,012
X2	,503	,134	,442	3,742	,000	,989	1,012

a. Dependent Variable: Y

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	4,09500998
	Absolute	,116
Most Extreme Differences	Positive	,089
	Negative	-,116
Kolmogorov-Smirnov Z		,852
Asymp. Sig. (2-tailed)		,463

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	54	42,00	55,00	46,7963	3,78368
X2	54	26,00	45,00	36,5741	4,29393
Y	54	41,00	55,00	49,1852	4,88770
Valid N (listwise)	54				